

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup kelompok pekerja rentan di sektor informal, seperti nelayan. Nelayan termasuk kelompok pekerja dengan tingkat ketidakpastian pendapatan dan risiko kerja yang tinggi, sehingga rentan mengalami kerentanan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, tingkat kesejahteraan nelayan masih tergolong rendah, di mana sebagian besar nelayan yang tinggal di kawasan pesisir hidup dalam kondisi ekonomi yang identik dengan kemiskinan, meskipun sektor perikanan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional (Mamuki et al., 2023).

Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya berkaitan dengan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga nelayan itu sendiri. Kesejahteraan rumah tangga nelayan, khususnya setelah mengalami risiko kerja, tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan atau kepemilikan jaminan sosial. Ketika nelayan mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, seperti hilangnya sumber penghasilan utama, bertambahnya pengeluaran rumah tangga, dan munculnya ketidakpastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kerja di sektor perikanan membawa dampak sosial dan ekonomi yang terjadi secara bersamaan.

Dalam situasi tersebut, rasa aman menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi nelayan dan keluarganya. Pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko tinggi dan penuh ketidakpastian, baik dari sisi keselamatan kerja maupun penghasilan. Saat risiko kerja terjadi, keluarga nelayan sering merasa khawatir terhadap masa depan, terutama terkait kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah kehilangan pencari nafkah utama. Rasa aman menjadi bagian penting dari kesejahteraan karena memengaruhi ketenangan dan cara keluarga nelayan dalam menghadapi kondisi sulit pascarisiko kerja.

Gangguan terhadap rasa aman tersebut kemudian berdampak langsung pada kondisi ekonomi rumah tangga nelayan. Ketika nelayan tidak dapat melaut akibat kecelakaan atau meninggal dunia, pendapatan keluarga menjadi tidak pasti, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Dalam kondisi ini, kesejahteraan tidak cukup dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima, tetapi juga dari kemampuan keluarga nelayan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Ketidakstabilan ekonomi yang dialami rumah tangga nelayan selanjutnya berpengaruh pada kemampuan mereka dalam mengakses layanan dasar. Setelah mengalami risiko kerja, kebutuhan terhadap layanan kesehatan cenderung meningkat akibat kecelakaan atau gangguan fisik, sementara kebutuhan pendidikan anak tetap harus dipenuhi. Ketika kemampuan ekonomi keluarga menurun, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan menjadi semakin terbatas, sehingga kondisi hidup rumah tangga nelayan ikut memburuk dan kerentanan sosial ekonomi semakin meningkat.

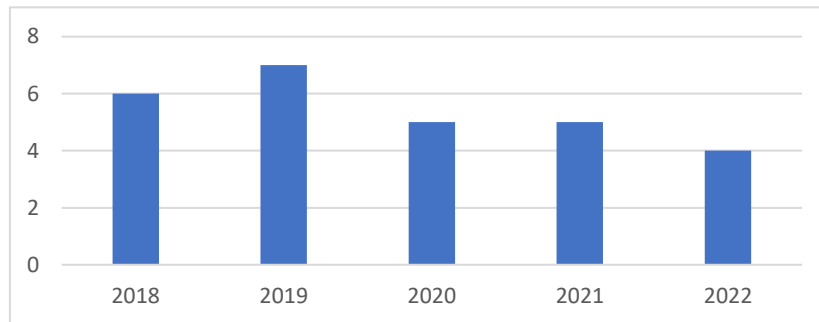
Dalam jangka panjang, risiko kerja tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pekerjaan dan sumber penghidupan keluarga nelayan. Ketika nelayan tidak lagi dapat bekerja secara optimal atau meninggal dunia, keluarga dihadapkan pada tantangan besar untuk melanjutkan kehidupan dengan sumber penghasilan yang terbatas atau tidak pasti. Oleh karena itu, kemampuan keluarga nelayan untuk bertahan dan menata kembali kehidupan setelah risiko kerja menjadi faktor penting dalam menentukan kesejahteraan mereka ke depan.

Tingginya risiko kerja dalam sektor perikanan memperkuat kerentanan tersebut. FAO (2010) mencatat bahwa risiko kecelakaan dan kematian nelayan saat melaut mencapai 20–30 kali lebih besar dibandingkan sektor pekerjaan lainnya. Risiko tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca ekstrem, kerusakan mesin kapal, serta kesalahan manusia (human error). Tingginya risiko kerja ini tidak hanya mengancam keselamatan nelayan, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup keluarga nelayan yang bergantung pada satu sumber pendapatan utama (Rasyid & Eryanti, 2020).



Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Gambar 1. 1 Data Kecelakaan dan Kematian pada Saat Pelayaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong



Sumber : Data Sekunder, 2024

Gambar 1. 2 Data kecelakaan kapal pada saat operasional kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Data kecelakaan dan kematian nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong menunjukkan bahwa setiap tahun masih terjadi kasus kecelakaan kerja dan kematian nelayan selama aktivitas pelayaran maupun operasional kapal. Kejadian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesalahan manusia, kerusakan teknis kapal, dan kondisi cuaca buruk (Prasetyawati, 2024). Kehilangan atau menurunnya kemampuan kerja nelayan akibat risiko tersebut berpotensi menurunkan kesejahteraan sosial nelayan dan keluarganya, terutama ketika tidak terdapat mekanisme perlindungan sosial yang memadai.

Sebagai bentuk upaya perlindungan sosial bagi nelayan, pada tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program JKK memberikan perlindungan berupa pembiayaan pengobatan dan santunan akibat kecelakaan kerja, sedangkan JKJ memberikan santunan kematian bagi ahli waris nelayan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak peserta, dengan tujuan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan ketika terjadi risiko kerja. Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemilik kapal di

sektor perikanan, dengan iuran Rp16.800 per bulan berdasarkan upah minimum Rp1.000.000 yang memberikan perlindungan selama 30 hari.

Namun, dalam praktiknya tingkat partisipasi nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan di PPN Brondong masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa dari total nelayan aktif sekitar 2.330 orang, jumlah nelayan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga tahun 2024 masih terbatas, sementara nelayan yang telah melakukan klaim hanya mencapai 67 orang dalam rentang tahun 2021–2025. Rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pengetahuan dan literasi asuransi, kurangnya sosialisasi program, serta adanya persepsi negatif nelayan terhadap proses klaim yang dianggap rumit dan tidak pasti (Mustikari, 2021).

Dalam kondisi pascarisiko kerja, klaim BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu bentuk perlindungan yang diterima oleh rumah tangga nelayan untuk membantu menghadapi dampak kecelakaan kerja atau kematian. Namun, manfaat klaim tersebut tidak serta-merta menentukan kondisi kesejahteraan keluarga nelayan. Dampak klaim sangat bergantung pada situasi yang dihadapi masing-masing rumah tangga, seperti besarnya pendapatan yang diterima setelah klaim, jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, usia nelayan, serta besarnya pengeluaran rumah tangga pascarisiko kerja. Perbedaan kondisi ini menyebabkan kemampuan setiap keluarga nelayan dalam bertahan dan pulih setelah risiko kerja menjadi tidak sama.

Oleh karena itu, kesejahteraan rumah tangga nelayan setelah menerima klaim tidak dapat dilihat hanya dari keberadaan klaim itu sendiri, tetapi dari bagaimana keluarga nelayan menjalani kehidupan setelah risiko kerja terjadi.

Kondisi tersebut tercermin dalam rasa aman yang dirasakan keluarga, kemampuan menjaga kestabilan ekonomi, kemudahan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta keberlanjutan kehidupan dan sumber penghidupan keluarga ke depan. Dengan memahami kesejahteraan melalui aspek-aspek tersebut, gambaran kondisi nyata rumah tangga nelayan pascarisiko kerja dapat dilihat secara lebih utuh dan sesuai dengan realitas yang mereka hadapi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai kesejahteraan rumah tangga nelayan pascarisiko kerja menjadi lebih tepat dilakukan pada lokasi yang secara langsung mencerminkan aktivitas kerja nelayan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong dipilih sebagai lokasi penelitian karena pelabuhan merupakan pusat seluruh kegiatan nelayan, mulai dari keberangkatan melaut hingga operasional kerja di kapal, di mana risiko kerja yang menjadi dasar klaim BPJS Ketenagakerjaan umumnya terjadi. Selain itu, PPN Brondong merupakan pusat aktivitas nelayan terbesar di Kabupaten Lamongan dan memiliki ketersediaan data kecelakaan kerja serta klaim BPJS Ketenagakerjaan yang relatif lengkap.

Sejalan dengan itu, penelitian sebelumnya oleh Maisandi (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan yang diukur melalui pengeluaran rumah tangga. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada kepesertaan asuransi dan belum secara khusus mengkaji dampak manfaat klaim yang diterima nelayan. Oleh karena itu, kajian yang menganalisis dampak klaim BPJS Ketenagakerjaan terhadap indeks kesejahteraan sosial rumah tangga

nelayan, khususnya di PPN Brondong, masih terbatas dan penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dampak klaim BPJS Ketenagakerjaan, pendapatan, tanggungan keluarga, usia, dan pengeluaran terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong?

1.3 Tujuan

Untuk menganalisis dampak klaim BPJS Ketenagakerjaan, pendapatan, tanggungan keluarga, usia, dan pengeluaran terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik terkait kesejahteraan sosial, khususnya dalam konteks perlindungan sosial bagi nelayan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai efektivitas program jaminan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pekerja di sektor informal Lainnya dengan mempertimbangkan pendapatan, tanggungan keluarga, jenis klaim, dan usia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi nelayan mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif mengidentifikasi hambatan dalam implementasi program untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.